



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 04 April 2016 06:00

Hasil Studi Tentukan Lokasi Kilang Blok Masela



AMBON - Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembangunan kilang Blok Gas Masela di darat. Keputusan Presiden itu pun diapresiasi seluruh masyarakat Maluku, namun soal lokasi pembangunan kilang gas abadi itu dibangun masih menjadi polemik.

Gubernur Maluku Said Assagaff meminta agar polemik soal penetapan lokasi pembangunan kilang gas antara Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dihentikan.

“Sekarang begini, mereka minta di darat, nah Presiden telah memutuskan di darat jadi jangan lagi di perdebatkan,” ungkap Said kepada Kabar Timur, Sabtu (2/4).

Dia mengatakan soal lokasi pembangunan kilang apakah akan dilakukan di MTB atau di MBD hal itu merupakan kewenangan pihak perusahaan namun, masalah tersebut nanti akan diputuskan setelah dilakukan hasil studi oleh tim independen.

“Jangan berkelahi karena hasil studi yang akan menentukan mana yang terbaik. Kalau dengan hasil studi pasti tidak ada yang protes,”ujarnya.

Terkait masalah tersebut, dia juga telah meminta menteri terkait untuk melakukan studi kelayakan. Menurutnya penetapan lokasi pembangunan kilang blok Gas Masela tentu akan dikaji secara mendalam dan sudah pasti pengoperasiannya akan membawa keuntungan bagi seluruh masyarakat Maluku.

“Saya sudah minta ke Menteri kita studi soal lokasinya belum tentu yang dekat bagus yang jauh tidak bagus,”katanya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Meski penentuan lokasi pembangunan kilang Blok Gas Masela ini sepenuhnya menjadi kewenangan pihak perusahaan, namun kedua kabupaten yang berdekatan langsung dengan Blok Gas abadi itu secara bersama menginginkan agar pembangunan kilang tersebut dilakukan di wilayahnya masing-masing.

Kabupaten MBD, meminta agar pembangunan kilang dilakukan di Pulau Babar, sedangkan Kabupaten MBD juga meminta agar pembangunannya dilakukan di Pulau Selaru. Masalah ini pun kemudian menjadi tarik menarik antara kedua daerah.

TAK OTAMATIS

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam mengingatkan bahwa skema pembangunan kilang darat (onshore) dalam pengelolaan Blok Masela tidak serta merta membuat daerah Maluku berkembang pesat.

Perlu diikuti kebijakan yang terintegrasi supaya sumber daya alam (SDA) gas yang melimpah bisa menstimulus perkembangan ekonomi dan industri di Provinsi Maluku dan sekitarnya.

“Memang tidak bisa otomatis seperti sulap. Perlu diikuti proses yang panjang supaya Blok Masela bisa memajukan daerah Maluku,” kata Syaikhul, pekan kemarin.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan bahwa upaya ini jelas tak bisa hanya mengandalkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perlu ada koordinasi dari Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membuat konsep pengembangan industri turunan dengan adanya pengembangan kilang gas Blok Masela. “Tentu saja harus melibatkan banyak lintas Kementerian,” ujar Syaikhul.

Ia mengingatkan peristiwa seperti kilang gas Arun di Aceh tidak terulang. Walaupun kilang gas Arun dikembangkan dengan skema onshore, nyatanya tidak membawahkan perubahan signifikan bagi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam hal ekonomi dan industri. “Itu jangan sampai terjadi di Blok Masela. Potensi disana besar untuk menggerakkan sektor rill di Maluku,” tutup Syaikhul.

Proyek pembangunan kilang darat di Blok Masela diperkirakan membutuhkan luas lahan 600-800 hektare. Wilayah yang potensial dijadikan lokasi pembangunan kilang gas adalah Pulau Selaru yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Proyek pembangunan kilang gas ini diperkirakan menyerap 7000 orang dimana 2000 orang diantaranya harus menetap.

Proyek ini membutuhkan panjang pipa 90 km dengan investasi 1,2 miliar Dolar Amerika Serikat (AS). Kilang LNG yang akan dibangun di Blok Masela diperkirakan memiliki kapasitas produksi 7,5 juta ton per tahun dengan total biaya investasi sebesar 9,9 miliar Dolar AS. (KTR/SC)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 04 April 2016 06:00

Pengamat Sebut Idrus-Pedro Tumbal



AMBON - Kebijakan tak jelas telah memicu terjadinya kasus pembelian Kantor Cabang Bank Maluku di jalan Darmo Surabaya. Disinyalir, pembelian hanya akal-akalan untuk bagi-bagi uang dari hasil mark up.

Terkait hal itu Kejati Maluku didesak memeriksa jajaran komisaris, pemegang saham mayoritas. Bahkan mereka yang berkompeten di DPRD Maluku. Pengamat perbankan, Julius Latumaerissa menilai pembukaan kantor cabang di Surabaya janggal.

Menurutnya, Direktur Utama Idrus Rolobessy dan Direktur Perencanaan dan Korsek Pedro R Tentua jadi tumbal sedang kesalahan pihak lain ditutupi. “Pedro dan Rolobessy jadi tersangka itu tidak memuaskan rakyat Maluku, tulis saya bilang. Kenapa? karena dua orang tersebut adalah korban. Dengan kata lain jadi tumbal,” cetus Latumaerissa.

Akademisi Universitas DR Soetomo (Unitomo) Surabaya ini meminta Kejati Maluku tidak terbang pilih. Jika itu terjadi patut diduga ada konspirasi antara pihak-pihak yang diduga kuat bertanggungjawab dengan Kejati Maluku.

Misalnya, sebut dia, Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon, keduanya diinformasikan menyetujui pembelian tersebut. Dengan demikian mereka patut diambil keterangannya. Atau diperiksa selaku saksi.

Kejati Maluku harus berani memeriksa kedua kepala daerah tersebut. “Jangan karena ada rapat-rapat rutin bulanan dengan gubernur, lalu Jaksa Tinggi Maluku tenggang rasa. Penegakkan hukum harus fair untuk semua orang. Tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya.

Menurutnya, tidak mungkin Idrus dan Pedro membeli kantor cabang tanpa persetujuan para pemegang saham. Dan walaupun ini disetujui, apakah sesuai prosedur atau tidak. Sebab itu para



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

pemegang saham patut diperiksa. Salah satunya terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kejaksaan perlu memastikan sejumlah hal terkait RUPS tersebut.

“Apakah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)? Kalau iya, apakah sesuai mekanisme atau tidak?” katanya.

Sebab putusan RUPS sah jika peserta hadir memenuhi formula 50 plus 1. Artinya, dihadiri oleh pemegang saham mayoritas yaitu gubernur ditambah seluruh pemegang saham lainnya dari kabupaten/kota. Peserta RUPS juga tidak bisa diwakili. Kalau sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Dijelaskan, pembukaan kantor cabang harus melalui perencanaan dan tahapan yang ketat. Bank American Expres di Amerika Serikat, sebutnya, tidak langsung buka kantor cabang di 150 negara di dunia.

Apalagi dari sisi urgensinya, jelas kantor cabang dimaksud tidak mendesak. Karena, Bank Maluku bisa menyewa sebuah ruang pada sarana perkantoran di lokasi itu sebagai kantor agen Bank Maluku.

Ini sesuai mekanisme di dalam industri perbankan. Dimana seharusnya sebuah agen kecil sebuah bank lebih dahulu didirikan pada lokasi yang dinilai layak.

Jika Bank Maluku meraih laba yang signifikan, selanjutnya bisa diadakan kantor kas keliling. Atau pada saat yang sama dibuka kantor kas kecil di di kawasan Darmo, Surabaya itu.

Dan kalau sudah waktunya membuka kantor cabang, kata Latumaerissa, anggaran yang dibutuhkan untuk kantor dimaksud juga tidak boleh lebih daripada Rp 8 miliar. “Itu aturan OJK. Lha kalau sampai Rp 54 miliar. Ini jadi pertanyaan besar? jangan-jangan ada motif lain di balik itu,” ujarnya.

Demikian pula pihak lain di DPRD Maluku. Pihak terkait di DPRD patut dimintai keterangan. Sebagai bank milik daerah, Bank Maluku tidak bisa dilepas pisah dari DPRD Maluku. Putusan apapun, setidaknya patut diketahui atau disetujui oleh lembaga representasi rakyat itu.

Jangan sampai kebijakan yang salah sasaran dan merugikan keuangan daerah ini justru diinisiasi dan diback up oleh oknum-oknum politisi.

Hal ini erat dengan aliran cash back atau fee proyek pengadaan dan pembelian kantor dan lahan Bank Maluku Cabang Surabaya. Bisa saja, para politisi ini turut kecipratan sisa uang mark up, dari Rp 45 miliar menjadi Rp 54 miliar itu. Sisa uang, menurutnya, seharusnya dikembalikan ke kas daerah. Bukannya dibagi-bagi.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

DESAK REPO

Sementara itu, desakan publik agar kasus repo saham di Bank Maluku, dituntaskan Kejati Maluku, terus bergulir. Kali ini, DPP Hena Hetu minta agar korps Adiyaksa itu tidak tebang pilih menangani kasus di bank milik pemerintah daerah itu.

“Ada persoalan besar yang sangat merugikan negara, yakni kasus repo saham yang merugikan Negara sekitar Rp 262 miliar. Dan publik sudah tahu kasus repo itu, tapi Hena Hetu melihat Jaksa tebang pilih,” kesal juru bicara DPP Hena Hetu, Rauf Pelu kepada Kabar Timur, kemarin.

Organisasi adat terbesar di Maluku itu justru menilai, persoalan kecil sengaja dibesarkan Kejati, namun persoalan besar pihak Jaksa melupakan. “Kalau persoalan besar Jaksa beluga tidak tahu. Ada apa ini? Yang merugikan negara yang sangat besar itu kasus repo. Jadi jangan Semut diseberang pulau kelihatan, Gajah didepan mata tidak kelihatan. Itu tidak boleh. Negara kita khan negara hukum,” tandasnya.

Karenanya, dia menilai, penetapan tersangka oleh Kejati Maluku terhadap Direktur Utama Bank Maluku, Idrus Rolobessy terkait pembelian kantor Cabang Bank Maluku di Kota Surabaya dipolitisir dan sengaja membunuh karakter Rolobessy.

“Kelihatannya kasus Idrus Rolobessy di politisir dan didiskreditkan dan pembunuhan karakter oleh permainan kotor, sehingga seorang putra jazirah dikorbankan. Jadi Hena Hettu tidak sepakat dengan ulah orang-orang yang mendeskreditkan Idrus Rolobessy. Nah, kalau jaksa betul professional diangkat kasus repo yang besar. Jangan persoalan kecil dibesarkan, persoalan besar dilupakan atau diabaikan,” imbuhnya.

Untuk itu, dia berharap, Kejati Maluku jujur mengungkap mengangnai kasus Bank Maluku. “Nah, selama ini Korps Adiyaksa menangani berbagai persoalan dengan kejujuran, tapi kali ini Hena Hetu melihat Korps Adiyaksa tidak jujur tangani bank Maluku. Apapun itu Hena Hetu tetap pasang badan untuk Idrus Rolobessy,” tegasnya.

Dikatakan, jika Repo Saham terus dibiarkan atau dilupakan, pihaknya akan melakukan aksi dan class action kepada Kejati Maluku. “Kalau dideskreditkan terus dan hal yang besar dilupakan kita akan lakukan aksi demo besar besaran. Jangan main-main. Kita akan lakukan class action terhadap Kejati Maluku. Apakah jaksa tidak tahu nominal kerugian negara di kasus Repo. Kita pertanyakan kredibilitas jaksa. Apakah yang menetapkan tersangka itu jaksa nakal. Jadi kita tetap pertanyakan,” pungkasnya

Sekedar tahu, Kasus Repo Saham Bank Maluku bermula ketika pertemuan yang tidak direncanakan antara Direktur Pemasaran PT Bank Maluku Wellem Patty dengan Dirut PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas, Andri Theodorus Rukminto di Ratu Plaza jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan itu.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Mereka kemudian sepakat untuk bermain saham. Hanya saja, uang dari kas Bank Maluku senilai Rp 262 miliar tak kembali. Meski direktur PT AAA kini meringkuk di tahanan Mabes Polri. Uang dengan nominal, ratusan miliar rupiah milik daerah itu benar-benar melayang. Dan mungkin ini tidak terjadi kalau saja negosiasi antara Wellem dan Andri di Ratu Plaza itu tidak ditindaklanjuti Dirut PT Bank Maluku Dirk Soplanit pada pertemuan berikutnya, di Hotel Niko (Pulnam) jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat.

Kasus-kasus dugaan korupsi pada Bank Maluku ternyata seperti fenomena gunung es. Ujungnya saja terlihat namun di bagian bawah lebih banyak lagi. Awalnya orang hanya menyangka, kasus bank Maluku cuma kredit macet PT Nusa Ina Pratama yang menyeret direktornya, Jusuf Rumatoras dan dua staf keuangan Bank Maluku salah satunya Buce Matitaputty.

Namun faktanya, tidak cuma mereka tiga, di kasus Repo obligasi bodong senilai Rp 262 miliar itu ada mantan-mantan pejabat bank yang seharusnya diusut. Yaitu Komisaris Utama Zeth Sahubura, Direktur Utama Dirk Soplanit dan Direktur Pemasaran Wellem Patty. (KTM)



Selasa, 05 April 2016 06:00

Kajati Pastikan Periksa Kepala Daerah



BULAN ini, penetapan tersangka kloter kedua di kasus dugaan markup pembelian lahan dan gedung kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, Jawa Timur, bakal diumumkan. Kajati pastikan usai Musrembang ada kepala daerah yang diperiksa. Siapa dia?

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Maluku, DR Jan S Marinka memastikan, penetapan tersangka tahap dua dilaksanakan pada bulan ini, menyusul sebelumnya tim penyidik kasus dugaan markup pembelian lahan dan gedung Bank Maluku di Surabaya, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Masing-masing: Mantan Direktur Umum Bank Maluku Idrus Rolobessy yang saat ini menjabat Direktur Utama Bank Maluku-Maluku Utara dan Pedro. “Penetapan tersangka tahap dua dilaksanakan pada bulan,” tegas Kajati Jan Marinka menjawab Kabar Timur, usai memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura, Ambon, Senin, kemarin.

Kajati menegaskan, akan ada kepala daerah yang diperiksa terkait dengan kasus. “Kepala daerah dimaksud pasti akan kita periksa. Enggak ada masalah itu. Selesai Musrembang, kita panggil untuk diperiksa,” Kajati Jan Marinka menegaskan. Sayangnya, Kajati tidak merinci, siapa kepala daerah yang dimaksud.

Kajati sendiri, sendiri buru-buru keluar dan masuk ke mobil meninggalkan wartawan. Kendati begitu, Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takandengan didampingi, Kasipenkum Sammy Sapulette mengungkapkan, pasca penyidikan selama tiga hari di Surabaya, timnya berhasil menemukan titik terang kasus ini.

Berdasarkan hasil penyidikan di Surabaya itu, dia memastikan ada penambahan tersangka baru yang dinanti-nantikan publik Maluku. “Hasil penyidikan tiga hari di Surabaya itu, kita pastikan akan ada tersangka baru yang cukup dinanti-nantikan publik Maluku,” tegas Ledrik, tanpa merinci jumlah tersangka tahap dua yang akan diumumkan dalam bulan ini.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Yang pasti lanjut dia, tersangka baru ini ada yang berasal dari eksternal Bank Maluku. “Yang pasti dari Surabaya kita semakin yakin untuk melangkah kedepan. Ya tersangka lain itu berasal dari luar Bank Maluku,” cetusnya di hadapan sejumlah wartawan.

Takandengan menjelaskan, tersangka baru yang dibidik bukan asal-asalan. Semua sudah berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam proses penyidikan sebelumnya. Selain ada kepala daerah yang dibidik, menurut Takandengan kalau media menyebutkan ada pihak-pihak lainnya di DPRD Maluku ikut terlibat, minimal kecipratan dana haram hasil mark up dimaksud. Dia meminta siapapun di DPRD Maluku jika mengetahui hal itu, minimal informasi awal agar ikut membantu tim penyidik dalam kasus ini.

“Supaya kita bisa buka tabir kasus ini. Kalau ada anggota DPRD yang bersuara, tidak mungkin tidak ada sumber informasinya. Jadi Kasidik Kejati menantang untuk ungkap, sumber itu dan apa info awalnya dengan bukti-buktinya,” tandas Ledrik Takandengan.

Sekedar tahu di Surabaya tim penyidik Kejati Maluku memeriksa 4 saksi lagi. Sesuai rencana tujuh orang diperiksa, namun tiga orang entah kabur atau berhalangan, yang jelas mereka berada di luar negeri. Takandengan mengatakan, akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang itu. Sebelum timnya mengajukan calon tersangka baru ke Jaksa Tinggi Maluku untuk tahap dua nanti.

DESAK USUT

Sementara itu, Kejati didesak segera memeriksa anggota DPRD Maluku, terkait aliran dana Bank Maluku di lembaga politik itu. Ini agar publik mengetahui siapa wakil rakyat yang kebagian dana haram senilai Rp 2 miliar.

“Jadi memang masyarakat tidak menuduh anggota dewan secara langsung, tapi Kejati sudah menyampaikan fakta hukum bahwa ada Rp 2 miliar beredar ke DPRD Maluku, terutama ke Pansus Bank Maluku. Ini akibatnya jadi bola liar. Akibatnya publik menuduh kita kalau Pansus terima dana itu,” kata salah satu anggota Pansus Bank Maluku DPRD Maluku, Samson Atapary kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Atas dasar itu, dia berharap, pihak Kejati segera mengusut secara tuntas aliran dana ke lembaga parlemen itu. “Jaksa harus usut tuntas, kalau Rp 2 miliar itu masuk itu yang terima siapa. Minimal inisial anggota dewan disebutkan, Kejati harus buka, dan bagi kesiapa-siapa fakta itu mesti dibuka. Ini supaya tidak ada dusta diantara kita dan tidak saling tuduh menuduh. Kalau misalnya 5 anggota dewan terima mesti buka dong inisialnya siapa. Ini yang saya tuntutan ke Kejati. Saya serius karena kita ini lembaga politik,” tandasnya.

Dia justeru menuturkan, dugaan wakil rakyat terima dana haram itu bisa berimplikasi negatif terhadap karier politik para wakil rakyat di senayan Karang Panjang. “Rumor kaya begini berimplikasi ke nama baik kita dan konstituen kita jangka panjang. Masyarakat kalau dengar itu lalu, meski ini hanya dugaan sudah kesimpulan seolah-olah kita terima. Sehingga ada yang tercecceh dan tidak ada dusta,” ingatnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Karenanya, dia minta kepada pihak Kejati bukan hanya lakukan metode penyidikan biasa, namun melakukan audit forensik, sehingga public mengetahui jejak kejahatan aliran dana itu. “Ini agar star dari mana dan finish dari mana, bisa ketahuan. Kalau hanya penyidikan biasa agak susah. Kalau cari bukti terima tanda tangan khan susah. Dan jaksa yang memulai dan tuntaskan. Dan kalau bisa mengabaikan kasus yang lain, tuntaskan kasus DPRD Maluku dulu. Kalau dalam minggu ini pun harus segera periksa anggota dewan, kalau terima dana itu harus diperiksa segera,” imbuhnya.

Ditambahkan, jika pihak Kejati tidak memprioritaskan dugaan dana menglair ke dewan, dirinya akan menggugat kejati Maluku. “Kejati harus perioritaskan dan kalau tidak dilakukan Kejati, mungkin sebagai anggota Pansus orang pertama yang akan gugat Kejati. Saya akan lakukan praperadilan karena saya bagian dari Pansus. Nama kita tercemar karena tidak buka oknum atau inisial siapa. Siapa yang terima lalu siapa yang bagi. Saya bagian dari anggota dewan dan anggota Pansus minta tuntaskan kasus ini. Ini agar tidak menjadi bola liar di publik. Ini agar clear. Jadi ternyata dari sekian anggota Pansus ini saja yang terima, tapi yang lain tidak terima karena bersih,” paparnya.

Terpisah, Direktur Transparan Anggaran dan Pembangunan Maluku, Darul Kutni Tuhepaly berharap, jika ada dugaan keterlibatan anggota DPRD Maluku terima duit, Kejati harus segera usut. “Karena ini Bank Maluku milik Pemda dan BUMD, itu berarti DPRD Maluku tahu persis. Apalagi, Bank Maluku bermitra langsung dengan Komisi C yang membidangi masalah keuangan dan BUMD,” kata Tuhepaly kemarin.

Karenanya, dia menduga aliran dana itu diterima oknum pimpinan dewan atau oknum pimpinan komisi C. “Kalau saya, jaksa harus telusuri dan periksa oknum pimpinan dewan atau oknum pimpinan komisi C. Karena ini dana besar. Jadi saya minta kalau ada keterlibatan oknum anggota dewan jaksa harus periksa secara tuntas. Apalagi Bank Maluku lagi disoroti aparat penegak hukum dan masyarakat,” ingatnya.

Lantas, peran Pansus Bank Maluku saat ini, mantan anggota DPRD Maluku ini menilai, Pansus tidak bergigi dan mubazir. “Mestinya Pansus punya gigi mengusut kasus yang ada. Ini khan pansus jadi tameng saja. Padahal setiap keputusan politik yang diambil, usut berbagai kasus itu yang terjadi. Pansus mesti berikan rekomendasi politik kalau ada temuan di Bank Maluku sejak awal,” pungkasnya. **(KTM/KTA)**



Jumat, 15 April 2016 06:00

KPK Dalam Penerima Aliran Dana Damayanti Cs



JAKARTA - KPK memeriksa Ketua Komisi V dari fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggaran 2016.

“Fary Djemy Francis diperiksa untuk tersangka DWP (Damayanti Wisnu Putranti),” kata Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Kamis (14/4).

Fary sudah tiba di gedung KPK namun tidak berkomentar apapun mengenai pemeriksaannya tersebut. Ini adalah pertama kalinya Fary diperiksa dalam kasus ini. Pada Rabu (13/4) KPK juga sudah memeriksa Wakil Ketua Komisi V dari fraksi Partai Demokrat Michael Wattimena.

Dalam sidang Senin (11/4) Damayanti mengakui bahwa “fee” dari dana aspirasi sudah dijatahkan untuk pimpinan fraksi, ketua kelompok fraksi (kapoksi) dan anggota Komisi.

“Untuk nilai merupakan hasil nego antara pimpinan Komisi V dan Kementerian PUPR sehingga masing-masing anggota mendapat jatah maksimal Rp50 miliar, kapoksi maksimal Rp100 miliar, utk pimpinan saya kurang tahu. Kami diberikan dari kapoksi, kapoksi dari pimpinan. Saya nilainya Rp41 miliar,” ungkap Damayanti pada sidang Senin (11/4).

“Di situ ada Fahri Prancis (Ketua Komisi V), Michael Wattimena (Wakil Ketua Komisi V), pimpinan yang saya lihat empat, yang saya baca empat. Anggota yang saya lihat ada Pak Bakri (HM Bakri), Musa (Musa Zainuddin), saya, Budi (Budi Supriyanto), Yoseph Umar Hadi, Sukur Nababan,” tambah Damayanti.

Yuyuk menegaskan bahwa KPK akan memanggil semua nama yang diduga terkait dengan kasus tersebut. “Kami pada dasarnya akan memanggil semua nama yang pernah disebut atau kami duga berkaitan dengan dan punya jejak atas kasus tersebut kami akan meminta keterangan dan sudah ada beberapa anggota Komisi V yang sudah diperiksa sebagai saksi. Penyidik masih mendalami hal ini,” tambah Yuyuk.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Yuyuk juga mengungkapkan belum mengetahui mengenai informasi tentang pembagian “fee” dalam Komisi V. “Saksi Michael Wattimena dimintai keterangan seputar peristiwa terkait anggota komisi V di DPR yang memutuskan proyek-proyek itu. Kita juga berprinsip ‘follow the money’ jadi orang-orang yang ada dalam aliran uang suap dalam rangkaian kasus itu kami akan mendalaminya,” tegas Yuyuk.

Dalam dakwaan Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir disebut memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp21,28 miliar; 1,674 juta dolar Singapura dan 72.727 dolar AS kepada Amran Hi Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Kapoksi PAN Komisi V Andi Taufan Tiro, Kapoksi PKB Komisi V Musa Zainuddin, Damayanti dan anggota Komisi V dari fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto. Tapi baru Damayanti dan Budi Supriyanto yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

KEMBANGKAN

Sementara itu, penyidik KPK terus bekerja mengusut kasus dugaan suap terkait proyek di di Maluku. Kasus ini telah menjerat lima orang tersangka termasuk dua anggota DPR, Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto, serta Dirut PT Windu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir.

KPK menegaskan akan mendalami dan membongkar jaringan suap yang diduga melibatkan anggota DPR dan pengusaha lainnya ini. Komisioner KPK, Laode M. Syarif mengatakan, pimpinan KPK selalu mendapat laporan perkembangan kasus ini setiap saat.

Namun, lanjut dia, KPK meminta setiap pihak untuk bersabar. Hal ini lantaran KPK ingin mengusut dan membongkar jaringan yang terlibat dalam kasus ini. “Mohon dipahami, kami ingin jaringannya dipelajari lebih luas dan mendalam,” kata Syarif.

Syarif berjanji, pihaknya akan mengungkap kasus ini. Termasuk dengan menjerat pihak lain yang terlibat. “Kami sepakat bahwa tidak mau membeda-bedakan orang,” tegasnya.

Di satu sisi, KPK, kata Syarif, berupaya berhati-hati dalam mengusut kasus ini. Dikatakan Syarif, tidak semua pihak yang diperiksa KPK dipastikan terlibat atau memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

“Tapi saat yang sama KPK tidak mau zalim. Belum tentu semua yang diperiksa di sini memenuhi unsur-unsur (tindak pidana korupsi). Sedang kami pelajari mudah-mudahan ada hasil yang cukup untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain,” jelasnya.

Dalam mengusut kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah pihak. Setelah memeriksa sejumlah pejabat Kempupera, beberapa hari belakangan ini KPK intens memeriksa sejumlah anggota DPR.

Pada Selasa (29/3) ini, KPK telah menjadwalkan memeriksa anggota Komisi V dari Fraksi PKB, Musa Zainudin, dan anggota DPR dari Fraksi PPP, Epyardi Asda serta anggota DPR dari Fraksi Hanura, Fauzih H. Amro. Sebelumnya, pada Senin (28/3), penyidik KPK juga telah memeriksa



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

anggota DPR dari Fraksi PDIP, Yoseph Umarhadi, anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra, Mohamad Nizar Zahro, serta anggota Komisi V dari Fraksi PAN, Andi Taufan Tiro.

Berdasar informasi, selain Damayanti dan Budi yang telah menjadi tersangka dan ditahan, terdapat setidaknya sejumlah anggota DPR lainnya yang turut terlibat dalam kasus ini. Mereka yakni, Musa Zainudin, Andi Taufan Tiro.

Selain itu, terdapat seorang pejabat Kempupera yang turut menerima uang dari Abdul Choir. Sementara dari pihak swasta, terdapat sejumlah pengusaha yang bersama Abdul Khoir turut memberi uang kepada anggota Komisi V.

Seorang sumber menyebut Musa dan Andi Taufan pernah bertemu dengan Dirut PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir yang juga telah menjadi tersangka kasus ini.

Dalam pertemuan ini, Abdul Khoir berupaya meyakinkan Musa dan Andi Taufan agar perusahaannya dapat menggarap proyek jalan di Maluku yang terdapat dalam anggaran Kempupera tahun anggaran 2016.

Padahal, proyek tersebut telah ditentukan pemenangnya. Kepada Musa dan Andi Taufan, Abdul Khoir menyatakan, PT WTU telah berulang kali menggarap proyek di Maluku dan wilayah timur dan sudah disetujui BBPJM IX.

Untuk itu, Musa pun meminta Abdul Khoir menyediakan uang sekitar 5 hingga 7 persen dari nilai pagu proyek senilai Rp 100 miliar. Sementara Yasti dan Michael Wattimena disebut tahu banyak mengenai pengaturan proyek tersebut. (SP/KT)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Jumat, 22 April 2016 18:33

Hari Ini Dua Saksi Kunci Diperiksa Jaksa



TIM Satgasus Kejati Maluku dijadwalkan hari ini, akan memeriksa dua saksi kunci dari eksternal Bank Maluku, yang bakal mengungkap skandal bank plat merah itu. Siapa mereka?

Pasca ditetapkan Bos CV Herves, Hentje Abraham Toisuta sebagai tersangka dari dua tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan penyidik upaya untuk membongkar skandal pembelian lahan dan bangunan untuk kantor cabang Bank Maluku dan Maluku Utara di Surabaya, terus dilakukan penyidik.

Fokus pemeriksaan saksi-saksi mulai digeser. Semula sejumlah saksi yang tak lain adalah para petinggi Bank Maluku dan sejumlah staf. Kali ini, penyidik fokus memeriksa saksi dari eksternal Bank Maluku.

“Ada dua saksi kunci yang kami agendakan untuk memintai keterangannya,” kata Kasidik Kejati Maluku Ledrik Takandengan, kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, kemarin. Kedua saksi itu, kata dia, berstatus sebagai saksi kunci.

Menyoal tentang siapa kedua saksi tersebut? Ledrik menolak merincinya dan hanya menyebut inisial kedua saksi tersebut. “Inisialnya YP dan HJ. Ini saksi kunci yang akan dipanggil untuk diperiksa pada hari ini, (Jumat, 22/4),” sebut Ledrik.

Dari lembaga apa kedua saksi ini, Ledrik menolak merincinya. Hanya saja, informasi yang berhasil dihimpun Kabar Timur menyebutkan, kedua saksi kunci ini adalah pegawai pada Dinas Koperasi dan Dinas Pendapatan Maluku.

“Setahu saya, keduanya adalah PNS. Satu dari Dinas Koperasi dan satunya lagi Dinas Pendapatan,” beber sumber itu.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Sementara itu, selain memeriksa kedua saksi kunci, pada hari ini ini juga tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan Izaak Saimima yang juga Komisaris bank Maluku. “Selain dua saksi hari ini kita agendakan pemeriksaan Izaak Saimima,” tambah dia.

“Pemeriksaan saksi-saksi ini setelah adanya pergeseran dalam pengusutan kasus ini. Kita akan lihat perkembangan kasus. Ada beberapa persoalan yang akan kita ditanyakan ke saksi terkait pembelian kantor cabang Bank Maluku di Suranaya,” ujar Ledrik.

ASET TERBENGKALAI

Sementara itu, Kantor PT Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Surabaya adalah aset daerah yang terbengkalai. Padahal anggaran untuk pembelian kantor tersebut di tahun 2014 mencapai Rp 54 miliar.

Kesimpulan itu diperoleh tim Satgagus Kejaksaan Tinggi Maluku dari pengakuan dua direksi PT Bank Maluku-Malut yang diperiksa sebagai saksi, Kamis (21/4).

Kepala Devisi Pemasaran Melkianus Tupan dan Kepala Devisi Satuan Kerja Audit Internal Bank Maluku, Yakop Leasa mengatakan hal tersebut kepada jaksa penyidik saat menjalani pemeriksaan, yang dimulai pukul 09.00- 14.00 WIT.

“Dari keterangan Leasa menyebutkan Bank Maluku (cabang Surabaya) merupakan aset terbengkalai. Kami akan menelusuri jika disebut sebagai aset terbengkalai, dalam proses pembeliannya karena ada transaksi yang tidak sesuai,” kata Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takandengan kepada wartawan di kantor Kejati Maluku, kemarin.

Tupan dan Leasa akan kembali dipanggil hari ini. “Karena ada beberapa data yang belum dilengkapi, kedua saksi ini harus kembali untuk memasukan dokumen yang kami butuhkan,” ujar dia.

PANGGIL PAKSA

Sementara itu dua kali dipanggil, Direktur Utama PT Bank Maluku-Malut Idris Rolobessy, mangkir atau tidak memenuhi panggilan tim jaksa penyidik.

Tersangka skandal Bank Maluku ini mangkir karena alasan sakit terhitung 20-21 April 2016. Meski mengaku sakit, namun Rolobessy terlihat memimpin jumpa pers di Bank Maluku, kemarin.

Ledrik kaget ketika mendapat informasi Rolobessy menggelar jumpa pers. “Saya tidak ada masalah dengan Idris Rolobessy, bila yang bersangkutan hari ini hadir jumpa pers di Bank Maluku mungkin itu hal yang penting. Terserah penilaian teman-teman,” ujarnya. Tim Satgasus akan kembali melayangkan surat panggilan ketiga kepada Rolobessy. Jika kembali mangkir, jaksa penyidik akan memanggil paksa orang nomor satu di Bank Maluku itu. **(KAF/RUZ)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 25 April 2016 06:00

Skandal Bank Maluku, Antara Politik & Penegakan Hukum



SKANDAL Bank Maluku menyita perhatian publik. Dua kasus antara repo dan kantor cabang Surabaya mengundang tanya geliat korps Adhyaksa. Antara politik dan hukum seolah bercibaku dalam kepentingan kasus ini. Benarkah?

Benang kusut dugaan markup pembelian lahan dan gedung Bank Maluku dan Maluku Utara di Surabaya, Jawa Timur, sedikit demi sedikit mulai terurai. Upaya Satgasus bentukan Kejati Maluku sedikit banyak telah berbuah hasil. Setidaknya, saat ini tiga orang telah resmi menyandang gelar sebagai tersangka.

Apakah akan ada tersangka lain, selain tiga tersangka itu? Belum pasti keinginan publik untuk membongkar setrang-terangnya kasus ini bisa terwujud. Kendati, Tim Satgasus tetap optimis bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Semua tergantung proses penyidikan yang saat ini dilakukan tim penyidikan. Berikan kesempatan kepada kami untuk bekerja profesional dan maksimal dalam mengusut kasus ini,” kata Kasidik Kejati Maluku, Ledrik Takandegan sebagaimana diberitakan Kabar Timur sebelumnya.

Optimisme Takandegan butuh pembuktian dan nyali. Palsunya, kasus dugaan markup pembelian kantor cabang “bank plat merah” ini jauh-jauh hari telah terendus ada “arus besar” bermain. Bahkan tiga orang yang difatwa tersangka hanyalah orang-orang yang nurut diperintah. Istilahnya mereka wayang dipusaran kasus ini.

Bos atau Direktur CV Harves Hentje Abraham Toisuta telah resmi menjadi tersangka baru dan orang pertama dari eksternal Bank Maluku. Dia satu-satunya tersangka dari eksternal atau masih ada lagi tersangka lain. Bola ini masih liar antara ada dan tiada. Pembuktian yang dimiliki jaksa akan menjawab semua rasa was-was publik Maluku.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

POLITIK

Kekuatan politik ikut “bermain” rapih di kasus ini, bisa iya bisa tidak. Iya, karena ada potensi untuk menjerumuskan dugaan keterlibatan kepala daerah. Pressure mengusut tuntas kasus ini, kencang yang intinya versus politik bahwa skandal ini ada keterlibatan kepala daerah.

Dugaan keterlibatan kepala daerah tidak lagi samar-samar disuarakan. Media cetak, online hingga medsos begitu terang dan getol seolah-olah dugaan keterlibatan versus mereka itu benar adanya. Ya namanya juga politik, dimana politik adalah dunia intrik dan tipu tapa yang tidak didasari dengan bukti-bukti sebagaimana tuduhan itu.

Mungkin saja, hari ini mereka berkuasa. Hari ini juga mereka lantang bersuara seolah-olah hukum bisa diatur-aturlah mengikuti selera kekuasaan. Dari pendekatan selera “politik” bisa saja dimaknai demikian, tapi dugaan keterlibatan kepala daerah di kasus Bank Maluku butuh pembuktian hukum yang akurat agar institusi penegak hukum tidak terpasung dengan selera politik mereka yang tengah berkuasa.

Ada kekuatan lain yang bermain mendorong kasus mark-up Bank Maluku untuk pembelian kantor cabang di Surabaya bisa dirunut benang merahnya dengan kepentingan politik, Pilkada Kota dan Pilkada Maluku tampaknya begitu klop. Intinya mereka ingin meraih kekuasaan dan simpatik lewat penegakan hukum.

BISNIS

Kasus Repo di Bank Maluku nilai kerugian diatas duaratus miliar rupiah. Kasus dianggap seolah-olah biasa. Tidak ada prioritas dalam menuntaskan kasus ini. Sementara, kasus pembelian lahan dan gedung kantor cabang Surabaya Rp 54 miliar menjadi prioritas, dan kenapa bukan repo.

Dari sisi bisnis tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan dan gedung di Surabaya. Artinya ketika lahan dan gedung di Jalan Raya Darmo yang telah di beli Bank Maluku dan Maluku Utara “dilego” alias dijual kembali saat ini nilainya taksir Rp 70 miliar. Itu berarti secara bisnis Bank Maluku untung tidak rugi.

Lain halnya dengan kasus Repo. Sedikitnya, Bank Maluku mengalami kerugian mencapai Rp 245 miliar. Dana nasabah sebanyak itu, tidak akan pernah kembali atau dinyatakan hilang. Tidak hanya itu, Bank Maluku sendiri dibebani dengan membayar bunga penjaminan Rp 300 miliar dari pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu, dipakai untuk bermain Repo.

Saat ini Bank Maluku tinggal menunggu jatuh tempo pinjaman itu. Ketika pinjaman itu, jatuh tempo Bank Maluku harus menyiapkan dana segar sebesar Rp 300 miliar untuk menutupi pinjaman tersebut. Setidaknya, secara bisnis Bank Maluku dan Maluku Utara dalam ancaman “bangkrut.” Apakah masalah Repo ini tidak juga membuka mata kita?



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

HUKUM

Untuk menyelamatkan Bank Maluku dan Maluku Utara dari kasus repo yang menguras dana Nasabah ratusan miliaran rupiah tidak ada jalan lain, kecuali gerak cepat aparat penegakan hukum dengan mengusut tuntas kasus ini. Siapa pun yang terlibat dalam kebijakan bermain repo harus diminta pertanggung jawabannya secara hukum.

Minimal harus ada yang bertanggung jawab. Hanya dengan tindakan hukum yang dapat menutupi kerugian Bank Maluku. Siapa yang bertanggung jawab di kasus ini, menjadi domain penegak hukum guna menelisik kekayaan yang dimiliki mereka.

Publik Maluku tahu, para mantan petinggi Bank Maluku “makmur” dari segi ekonomi, miliki rumah mewah, mobil mewah dan lain-lain. Dengan adanya dugaan keterlibatan mereka, setidaknya upaya untuk memperkecil kerugian Bank Maluku dapat ditekan, melalui pendekatan penegakan hukum yang komprehensif tanpa tebang pilih.

Tidak ada jalan lain untuk mengembalikan kerugian Bank Maluku dari transaksi repo. Satu-satunya jalan adalah Kejaksaan Tinggi Maluku dibawah komando Jan Marinka, tidak hanya fokus bermain di kasus pembalian lahan dan gedung di Surabaya. Tapi kembali fokus dan prioritaskan pengusutan Repo. Pasalnya, di kasus itu jelas dan terang Bank Maluku dirugikan ratusan miliar rupiah dan kerugian ratusan miliar rupiah nyata bukan rekayasa politik. (KIE/KT)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Jumat, 29 April 2016 08:14

Dalang “Judi Proyek” di BPJJN Maluku Belum Disentuh



AMBON - Kejahatan “judi” proyek APBN-APBNP di Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN), Maluku dan Maluku Utara belum sentuh pelaku utama alias dalang di pusaran kasus Damayanti Cs, yang ditangani KPK.

Lembaga Superbody ini telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka di kasus suap Damayanti Cs, untuk proyek jalan di Pulau Seram, Maluku. Bahkan, Kepala BPJJN Amran Mustari ikut menyandang gelar tersangka.

Langkah cepat KPK patut diapresiasi, kendati masih ada aktor utama yang belum terbongkar. “Dari anatomi kasus OTT yang menjerat Damayanti Cs, Abdul Khoir dan Kepala BPJJN Maluku & Maluku Utara yang telah berstatus tersangka tidak akan mengakhiri kejahatan “judi” proyek di Maluku,” tegas Ahmad Sueb salah satu penggiat anti korupsi asal Maluku kepada Kabar Timur, tadi malam.

Menurut dia, tindakan KPK di kasus Damayanti Cs tidak akan banyak memengaruhi modus jual beli paket proyek di Maluku dan Maluku Utara, sepanjang para “master camp” alias dalang tidak sentuh penyidik anti rasuah itu.

“Jelas dalangnya ada di Kementerian PURR. Tersangka Amran Mustari selaku Kepala BPJJN hanya perpanjangan tangan dari dalang yang menjadi atasannya. Mana bisa seorang Amran Mustari bermain begitu tanpa sepengetahuan atasan. Setidaknya ini menjadi catatan penting penyidik KPK,” terangnya.

Dikatakan, buah dari tindakan cepat KPK dalam pengusutan kasus suap proyek di Kementerian PURR untuk Maluku dan Maluku Utara hanya bertahan singkat, bila dalang atau master camp di Kementerian itu tidak disentuh penyidik.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

“Paket-paket proyek ratusan miliar diatur dan dirancang di Kementerian PURR selanjutnya diserahkan di DPR untuk dibahas. Tidak hanya dana aspirasi. Yang atur semua paket proyek itu Kementerian PURR. Jadi jelas dalang atau master camp masalah ini ada disitu. Siapa dia menjadi tugas penyidik. Bila ini tidak dibongkar jangan pernah bermimpi BPJJN Maluku bisa bersih dari praktek judi proyek itu,” ungkapnya.

Dia mengaku, ada sejumlah pengusaha asal Maluku yang tahu persis modus para dalang dan master camp di Kementerian PURR yang kerap terlibat langsung dalam judi paket proyek di BPJJN Maluku dan Maluku Utara.

Tiga paket proyek jalan ratusan miliar tahun 2015 di Kabupaten Buru yang bermasalah menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar dalang atau master camp yang kerap terlibat langsung berjudi paket proyek di BPJJN Maluku dan Maluku Utara.

“Saya pernah bertemu dengan salah satu pengusaha asal Maluku. Dia bercerita banyak tentang bobroknya para pejabat di Kementerian PURR terkait dengan paket-paket proyek di BPPJN Maluku-Maluku Utara. Bahkan di tahun 2015 tiga paket proyek di Pulau Buru ternyata proses tendernya hanya akal-akalan. Hasilnya, ketiga paket proyek itu dalam realisasinya tidak tuntas,” bebernya mengutip pengusaha itu.

Menurutnya, apa yang diungkap pengusaha pada dasarnya sesuai dengan realitas dari realisasi ketiga paket proyek di lapangan bermasalah. Pasalnya, sejumlah staf di BPPJN Maluku-Maluku Utara ikut menikmati fee dari paket proyek itu hingga mencapai Rp 9 miliar rupiah.

“Saya berharap KPK dapat menangkap dalang atau master camp “penjudi” paket proyek di Kementerian PURR, lewat pengusutan tiga paket proyek yang ada di Pulau Buru itu. Termasuk tiga pejabat di BPJJN Maluku yang menerima dana Rp 9 miliar di proyek dimaksud,” sebutnya.

Terpisah salah satu pengusaha Maluku yang enggan namanya di korankan mengaku, siapa memberikan kesaksian di KPK guna membongkar skandal jual beli paket proyek yang melibatkan pejabat di Kementerian PURR.

“Saya tahu siapa pejabatnya. Saya kalau diminta untuk memberikan kesaksian tentang skandal jual beli paket proyek di BPJJN Maluku-Maluku Utara, saya siap. Saya tahu siapa pejabat itu,” ungkap dia.

Dia juga bahkan meminta Kabar Timur untuk menghubungi penyidik KPK, agar dirinya memberikan kesaksian tentang siapa-siapa saja dalang yang kerap menjual paket-paket proyek itu.

“Jadi staf-staf di BPPJN Maluku-Maluku Utara bekerja sesuai petunjuk dari pejabat di Kementerian PURR. Dia adalah pejabat penting berinisial “OG” setelah Dirjen. “OG” kunci membongkar skandal jual beli proyek. Saya siap jika diminta menjadi saksi di KPK,” bebernya menutup. (MG1/KT)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Jumat, 29 April 2016 08:14

Pedro Praperadilan Kajati Maluku



AMBON - Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pembelian lahan dan gedung kantor PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BM - Malut) Cabang Surabaya (Jatim) Pedro Tentua memperadilkan Kepala Kejaksaan Tinggi(Kajati) Maluku, Samuel Maringka di Pengadilan Negeri Ambon.

Hakim tunggal PN setempat, Mathius, membuka sidang perdana di Ambon, Kamis, dengan agenda mendengarkan pembacaan permohonan pra peradilan oleh tim penasihat hukum pemohon, Moritz Latumeten, La Hane serta La Ode Abdul Mukti.

Sedangkan Kajati Maluku selaku pihak termohon didampingi tim penasihat hukum yang terdiri dari Fahrizal, Yohanes Siregar dan Sammy Sapulette.

Untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka, penyidik paling tidak sudah memiliki dua alat bukti yang kuat.

Namun, pemohon sudah keburu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik sehingga dipandang perlu mengajukan permohonan pra peradilan terhadap Kajati Maluku.

“Seharusnya ada dua alat bukti awal untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Jadi tujuan praperadilan itu koreksi untuk kinerja jaksa sebab tidak ada manusia yang sempurna agar lebih profesional,” kata Moritz dalam persidangan.

Pedro adalah mantan Kepala Devisi Renstra dan Korsek BUMD milik Pemprov Maluku yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Direktur Umum PT. BM-Malut, Idris Rolobessy.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Selain itu, pemilik PT. Harvest, Hentje Toisuta yang menjadi rekanan PT. BM-Malut dalam pembelian lahan dan kantor cabang yang terletak pada kawasan Jalan Darmo di Surabaya pada 2014 senilai Rp54 miliar.

Idris dan Pedro ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Maret 2016, sedangkan Hentje Toisuta di pertengahan April 2016, setelah tim penyidik kembali dari Surabaya untuk melakukan pemeriksaan saksi.

Penetapan tersangka ini karena terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan internal PT. BM-Malut maupun eksternal seperti aturan BI yang berakibat kerugian keuangan negara sebesar Rp7,6 miliar.

Hakim PN Ambon menunda persidangan hingga Selasa, (3/5) dengan agenda mendengarkan duplik tim penasihat hukum termohon dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. **(AN/KT)**